**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar belakang**

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sehingga program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Kania (2013) mengatakan pengembangan pariwisata perlu ditingkatkan langkah-langkah yang terarah dan terpadu menegenai pendidikan tenaga-tenaga kerja dan perencanaan pengembangan fisik. Kedua hal tersebut hendaknya saling terkait sehingga pengembangan tersebut mejadi realistis dan proposional.

Oleh karena itu, industri pariwisata memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari kontribusi pariwisata terhadap jumlah kunjungan wisatwan yang meningkat tiap tahunnya.

Nusantara memberikan pula andil penting dalam perkembangan kegiatan pariwisata di Indonesia dengan sumbangan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2001 tercatat 103.884 juta Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan wisata didalam negeri dengan mengahabiskan pengeluaran wisata mereka sejumlah Rp 58,71 triliun. Kondisi tersebut meningkat tiap tahunnya sehingga pada tahun 2009 telah mencapai angka 119.944 juta orang wisatawan nusantara dengan pengeluaran sebesar Rp 137, 91 triliun (Muljadi, 2014)

Dengan adanya pariwisata akan mendatangkan berbagai dampak di berbagai segi, antara lain dampak lingkungan,sosial budaya, dan dampak ekonomi. Dari segi ekonomi adanya pariwisata membawa berbagai macam dampak meliputi dampak langsung,dampak tidak langsung, dan dampak lanjutan. Dampak langsungnya bagi pekerja di kawasan wisata tersebut termasuk pemerintah daerah. Dampak tidak langsungnya salah satunya berupa meningkatnya permintaan akan tranportasi umum. Dan dampak berkelanjutannya tentu berhubungan dengan pemerintah dan masyarkat yang bekerja di bidang pariwisata atau pun tidak secara langsung tetapi mendapatkan dampak positifnya.

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba terus berupaya melakukan pembangunan disegala sektor, baik pembangunan yang berupa fisik maupun mental. Hal tersebut ditujukan guna meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya suatu tujuan daerah. Pembangunan daerah mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat maupun kemakmuran yang adil dan merata. Perencanaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan banyak dilakukan bertujuan untuk memperbaiki tingkat dan keadaan hidup penduduk di suatu daerah, dan juga untuk menciptakan lingkungan hidup yang fungsional, menyenangkan, aman, menarik, dan lebih indah, baik untuk masyarakat maupun bagi wisatawan sebagai pendatang. Secara umum pembangunan diartikan sebagai suatu proses terencana dari situasi nasional ke situasi nasional yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan merupakan suatu konsep yang dinamis sebab selalu berubah sesuai dengan kondisi kerangka sistem sosial yang menyertainya. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan seimbang, selaras, dan saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara semua bidang (Muljadi, 2014).

Pemerintah bertekad untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah, baik dalam aspek administrasi pemerintahan maupun dalam aspek pengelolaan program pembangunan lembaga-lembaga pemerintahan dan pelaku-pelaku pembangunan di daerah. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Yang diatur dalam UUD 1945 Bab VI yang terdiri dari Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Di mana dalam pasal 18 ayat (2) menyebutkan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.Dengan demikian pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahannya sendiri dan menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang menjadi urusan pemerintah pusat. Selain itu juga pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian, pemerintah melalui kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menetapkan kebijakan bahwa wisata bahari (*marine tourism*) merupakan salah satu prioritas pengembangan produk pariwisata Indonesia. Melihat perspektif pembangunan sektor kepariwisataan Indonesia diharapkan mampu menambah penghasilan devisa negara dari sektor bahari (Muljadi, 2014).Sektor pariwisata bahari di Indonesia di setiap wilayah ataupun daerah memiliki pontensi dan daya tarik wisata masing-masing, misalnya di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bulukumba. Yang terletak diujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terkenal dengan industri perahu phinisi dan potensi wisata bahari yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Jumlah banyak objek wisata yang banyak mampu menjadi daya tarik pengunjung wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Pemerintah Kabupaten Bulukumba bekerjasama dengan dinas kebudayaan dan kepariwisataan memperkenalkan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba serta memperbaiki infrastruktur setiap objek wisata guna mendorong minat wisatawan domestik dan wisata mancanegara. Dengan banyaknya minat wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara berkunjung ke Kabupaten Bulukumba maka secara langsung hal ini akan berdampak pada Pendapatan yang di terima melalui pembayaran tiket masuk objek wisata. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2010-2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | | Objek wisata | | Tahun | | | | |
|  |  | | 2010 | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1 | Pantai Pasir Putih Bira | | 87,400 | | 87,000 | 98,030 | 115,343 | 137,087 | |
| 2 | Pua Janggo | | 1,800 | | 2,500 | 2,000 | 1,050 | 1,290 | |
| 3 | Makam Dato Tiro | | 7,300 | | 8,450 | 5,000 | 9,150 | 9,550 | |
| 4 | Permandian Hila-Hila | | 6,000 | | 5,525 | 5,950 | 6,155 | 5,335 | |
| 5 | Pantai Lolisang | | 1,800 | | 1,910 | 1,400 | - | 2,005 | |
| 6 | Pantai Samboang | | - | | 3,100 | 5,200 | 1,365 | 2,174 | |
|  | Jumlah | | 104,300 | | 105,385 | 117,580 | 113,063 | 157,441 | |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan kepariwisataan Kab.Bulukumba (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Objek wisata Pantai Pasir Putih Bira dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, sedangkan Objek wisata Pua Janggo tercatat terjadi Fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan, begitu pula untuk Objek wisata Makam Dato Tiro, Permandian Hila-Hila, Pantai Lolisang, dan Pantai Samboang terjadi jumlah kunjungan wisatawan yang berfluktuasi.

Sejalan dengan hal tersebut perlu adanya sebuah kebijakan dan langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan asli daearahnya. Muljadi (2014) mengatakan upaya mencapai sasaran pembangunan di pelukan suatu stategi kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan terus-menerus antara lain: menjadikan kepariwisataan sebagai pengahasil devisa utama, menjadikan kepariwisataan nusantara sebagai pendorong pembangunan, meningkatkan ketangguhan kepariwisataan nasional, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kemitraan masyarakat, swasta, dan media massa, dan peningkatan kerja sama lintas sektoral. Karena kemajuan industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang dating. Sehingga harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan daerah tujuan wisata (DTW).

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak sehingga wisatawan yang mengunjungi obyek – obyek wisata di Kabupaten Bulukumba dikenakan pajak yaitu pembayaran tiket masuk objek wisata sebagai upaya untuk menggali potensi daerah melalui peningkatan Pendapatan Perkapita Kabupaten Bulukumba. Perkembangan penghasilan yang diterima obyek wisata berupa pembayaran tiket masuk objek wisata dan terhadaap peningkatan Pendapatan Perkapita Kabupaten Bulukumba periode tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2 Rata-rata penerimaan pembayaran tiket masuk objek wisata dan pendapatan perkapita di Kabupaten Bulukumba,

|  |
| --- |
| Tahun Rata-rata Penerimaan Tiket Pendapatan Perkapita  Masuk Obyek Wisata (Juta Rp)  (Juta Rp) |
| 2010 24,518,056 9,537.34  2011 24,779,028 10,755.40  2012 98,896,944 12,580.78  2013 112,811,333 14,400.00  2014 133,167,167 16,000.00 |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan kepariwisataan Kab.Bulukumba (2015, diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat penerimaan dari tiket masuk obyek wisata dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Bulukumba yang cenderung meningkat, terutama tahun 2010-2014 hal ini disebabkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang dimana secara tidak langsung menambah jumlah penerimaan melalui penerimaan dari tiket masuk di beberapa objek wisata, ini terlihat dari jumlah penerimaan tiket masuk objek wisata tahun 2012 yaitu sebesar 50.93% dan pada tahun 2013 meningkat yaitu sebesar 60.76%, sedangkan pada tahun 2014 diperoleh sebesar 70.99%. Sehingga sektor industri pariwisata sebagai salah satu sektor yang diandalkan bagi penerimaan daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Bulukumba dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi pariwisata yang dimiliki sebagai usaha untuk mendapatkan sumber dana melalui terobosan-terobosan baru dalam upaya membiayai pengeluaran daerah melalui retribusi yang didapatkan dari masing-masing obyek pariwisata di tiap daerah. Salah satunya dengan peningkatan kualitas dan obyek kepariwisataan yang baru di Kabupaten Bulukumba. Hal ini akan mendorong meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah terutama dari penerimaan hasil tiket masuk obyek wisata dan juga akan mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat sekitarnya yang dapat membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian tersebut jumlah kunjungan wisatawan yang tidak merata di setiap objek wisata dan dengan melihat jumlah penerimaan dari tiket masuk objek wisata dan pengaruhnya terhadap meningkatnya pendapatan kerkapita Kabupaten Bulukumba maka **“Pengaruh Harga Tiket dan Pendapatan Perkapita Terhadap Permintaan Wisata di Kabupaten Bulukumba”** menarik untuk dikaji.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pengaruh harga tiket dan pendapatan perkapita terhadap permintaan objek wisata di Kabupaten Bulukumba layak untuk dikaji.

* 1. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh harga tiket dan pendapatan perkapita terhadap permintaan objek wisata di Kabupaten Bulukumba.

* 1. **Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini secara umum diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Sebagai informasi mengenai pentingnya potensi sektor pariwisata yang mampu meningkatkan permintaan wisata di Kabupaten Bulukumba.
2. Sebagai wahana bagi penulis untuk menambah pengetahuan mengenai konsep-konsep teori yang diperoleh terhadap pembahasan permasalahan yang diperoleh terhadap pembahasan permasalahan yang ada.